

GLOBALISASI KOMUNIKASI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Zulkifli M

Abstrak: Globalisasi pada hakikatnya adalah proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia.

Globalisasi pendidikan khususnya di Indonesia ditandai oleh ambivalensi yaitu berada pada kebingungan, karena ingin mengejar ketertinggalan untuk menyamai kualitas pendidikan internasional. Kenyataannya Indonesia belum siap untuk mencapai kualitas tersebut. Padahal kalau tidak ikut arus globalisasi ini, Indonesia akan semakin tertinggal.

Globalisasi pendidikan membawa dampak adanya kesenjangan sosial di dalam dunia pendidikan, karena hanya orang-orang yang mempunyai modal lebih besar saja yang dapat menikmati kualitas pendidikan dengan standar internasional.

Merosotnya kualitas pendidikan tak bisa dipisahkan dari kebijakan negara pada sector pendidikan. Menyamakan lembaga pendidikan dengan lembaga keuangan jelas merupakan keputusan yang keliru. Karena itu, perlu adanya perombakan pada kebijakan yang menyangkut masalah pendidikan dengan menelurkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kaum miskin. Komersialisasi pendidikan mutlak harus dihentikan karena hanya memunculkan sekelompok orang yang menggunakan pendidikan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan.

Kata Kunci: Globalisasi komunikasi, pendidikan.

Pendahuluan

Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Istilah globalisasi diciptakan untuk menggambarkan ruang lingkup perkembangan-perkembangan yang sedang terjadi dalam komunikasi dan kebudayaan (Featherstone, 1990).

Munculnya istilah globalisasi/liberalisasi pendidikan tinggi bermula dari WTO yang menganggap pendidikan tinggi sebagai jasa yang bisa diperdagangkan atau diperjualbelikan. Tiga negara yang paling mendapatkan keuntungan besar dari liberalisasi jasa pendidikan adalah Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Australia.

Menurut pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara pada pasal 28 B ayat (1) mengamanatkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, demi kesejahteraan umat manusia” dan pasal 31 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”

Hak pendidikan menjadi hak setiap warga negara, karena jika hak ini berhasil diimplementasikan dengan baik, maka bangsa ini pun

akan memperoleh kemajuannya. Karena pendidikan merupakan pondasi kehidupan bernegara. Pendidikan memiliki peran kunci dan strategis dalam memajukan sebuah bangsa. Dari pendidikan sebuah bangsa bisa dibuat maju atau mundur ke belakang.

Pendidikan merupakan aspek penting dalam era globalisasi. Tiga persoalan ini sangat berpengaruh dalam perkembangan dunia pendidikan. Sebab peningkatan SDM, yang menjadi tugas dan tanggung jawab utama pendidikan, sangat dipengaruhi faktor globalisasi dan teknologi. Pengaruh globalisasi, kemajuan teknologi dan informasi serta perubahan nilai-nilai sosial harus diperhitungkan dalam penyelenggaraan pendidikan, apalagi tanggung jawab dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pokok melahirkan manusia yang berkualitas.

Pendidikan mulai diperhitungkan lebih serius sebagai tonggak utama dalam pertumbuhan dan pembangunan dalam konsepsi knowledge economy, terutama karena terjadinya pergeseran besar dari orientasi kerja otot (*muscles work*) ke kerja mental (*mental works*). Dalam konsepsi ini, peranan dan penguasaan informasi sedemikian vitalnya, sehingga kebutuhan dalam proses pengumpulan, penyaringan, dan analisa informasi menjadi sedemikian penting.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai dengan semakin kencangnya arus globalisasi dunia membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Teknologi berkembang sangat pesat, pemerintah juga jadi kerepotan dan akhirnya mengubah kurikulum pendidikan di Indonesia disesuaikan dengan tuntutan era globalisasi. Padahal kurikulum di Indonesia itu sudah berulang kali dimodifikasi, bahkan diubah-ubah. Bahkan sering ada anggapan bahwa setiap kali

ganti menteri tentu ganti kurikulum. Yang lebih membingungkan lagi, setiap terjadi perubahan pendekatan atau teori selalu disertai dengan berbagai jargon dan istilah-istilah baru. Dulu CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif), kemudian *link and match*, kemudian KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi), KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), dan terakhir kurikulum 2013. Berikutnya entah berbasis apa lagi. Ujungnya selalu saja ganti buku, ganti cara membuat persiapan mengajar, ganti cara ulangan, ganti cara tampil di kelas dan sebagainya. Bahkan, sering terjadi, kurikulum telah dimodifikasi lagi ketika kurikulum lama belum sampai di sekolah.

Orientasi pengembangan materi kurikulum bukan hanya pada pencapaian target penyampaian materi pembelajarannya saja melainkan juga pada pencapaian ketuntasan belajar peserta didik terhadap materi pembelajaran. Ketuntasan belajar menunjukkan kemajuan peserta didik dalam penguasaan seluruh materi pelajaran selama pembelajaran dilihat dari tercapainya indikator pembelajaran (Munir, 2008). Dengan demikian dalam mengembangkan materi kurikulum perlu dipertimbangkan faktor karakteristik materi yang akan disampaikan dan faktor pengalaman belajar yang akan dilalui peserta didik. Menurut Sa'ud, U.S. (2008) bahwa maju mundurnya pendidikan bergantung sejauhmana pemahaman guru dalam melaksanakan tugasnya di sekolah termasuk pemahaman terhadap kurikulum. Karena itu sifatnya mutlak bagi guru dalam membelajarkan siswa memahami strategi inovasi kurikulum, tanpa guru melakukan inovasi kurikulum rasanya sulit diketahui secara pasti bagaimana kemajuan pendidikan dapat diketahui secara pasti.

Globalisasi

Perkembangan yang sedang terjadi dalam komunikasi dan kebudayaan, tidaklah berarti menggantikan sistem sosial dan kebudayaan lokal yang selalu ketinggalan zaman, mistis dan lain-lain, tetapi yang mengagumkan dari teknologi ini adalah bahwa kita belum, dan takkan pernah menjadi satu bangsa global seragam. Hampir setiap sudut dunia, membenarkan bahwa kekuatan-kekuatan homogenisasi yang kuat, termasuk persenjataan militer, teknik periklanan, bahasa-bahasa yang dominan, format media, dan kecenderungan mode, tak dapat disangkal mempengaruhi kesadaran dan kebudayaan di setiap Negara.

Ruang pengaruh semacam ini memperkenalkan dan memperkuat nilai-nilai dan praktek-praktek tertentu yang menjadi standar, tetapi pengaruh politik, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan ini tidak mampu membuat konteks budaya jadi seragam, karena selalu berinteraksi dengan kondisi lokal yang beraneka ragam. Dipraktikkannya pada skala global, kekuatan-kekuatan budaya yang menghomogenkan menghadapi banyak ragam ideologi dan tradisi, ini justru menghasilkan berbagai dialog yang heterogen (Appadurai, 1990).

Sama halnya dengan program televisi (TV), film, dan musik pop tidak mengubah konsumen perorangan menjadi korban-korban pasif dalam masyarakat manapun, demikian pula kekuatan untuk menyampaikan informasi ke seluruh dunia tidak merangsang peniruan atau penerimaan otomatis pada tingkat nasional atau budaya.

Kekuatan-kekuatan modernitas jelas mengubah wajah kebudayaan dunia dan juga hubungan-hubungan politik,

ekonomi. Tetapi globalisasi yang meresap sebagai akibatnya lebih merupakan sebuah organisasi kebhinekaan ketimbang sebuah replika keseragaman (Hannerz, 1990).

Pengaruh-pengaruh lokal dan regional tidak lenyap di hadapan kebudayaan impor. Konsep kebudayaan itu sendiri mengandaikan perbedaan. Sebagaimana dikemukakan sosiolog Inggris Anthony D. Smith (1990) bahwa jika kebudayaan dimaksudkan suatu cara hidup kolektif, atau suatu repertoar kepercayaan-kepercayaan, gaya hidup, nilai-nilai, dan simbol-simbol, maka kita hanya mungkin berbicara tentang kebudayaan-kebudayaan, tak pernah hanya satu kebudayaan, sebab suatu cara hidup kolektif atau suatu repertoar dari kepercayaan-kepercayaan dan sebagainya, mengandaikan cara dan repertoar yang berbeda dalam suatu universum cara-cara repertoar-repertoar. Jadi, konsep mengenai sebuah kebudayaan global praktis merupakan suatu kemustahilan.

Jadi, kebudayaan bergerak secara dialektis antara kekuatan untuk pelestarian dan untuk perubahan, antara tradisi dan inovasi. Bagaimana manusia mengelola ketegangan-ketegangan budaya, itulah kunci untuk memahami stabilitas masyarakat modern (James Lull, 1998).

Teknologi komunikasi adalah fundamental bagi argument ini. Media massa jauh lebih banyak memperbesar keanekaragaman budaya dibandingkan dengan menyeragamkannya. Jadi, dalam pembangunan kebudayaan global kontemporer, manusia, mesin, uang, citra, dan ide makin banyak mengikuti jalur non-isomorfik. Globalisasi sebaiknya dianggap sebagai sebuah himpunan yang kompleks dari arus manusia,

materi dan simbol yang berinteraksi dan sering kali bertentangan sehingga melahirkan sikap dan praktik budaya yang beraneka ragam, yang terus menerus memodifikasi secara bervariasi faktor-faktor kekuasaan, sosial, politik, dan budaya yang telah mapan. Di lain pihak, apabila perubahan telah dirintis dan memberikan keuntungan tanpa merusak hubungan budaya, maka hasilnya akan baik sekali (Eduard Depari, 1998). Persoalan yang erat hubungannya dengan ikatan budaya dalam proses pembaharuan adalah mengusahakan agar setiap aspek perubahan sosial harus ditempatkan pada suatu dasar pemikiran yang luas agar dapat menyesuaikan diri dengan pengaruh-pengaruh yang timbul serta usaha-usaha mempertahankan nilai-nilai budaya yang bermanfaat, dan memperlancar proses peralihan. Agar dapat melaksanakan pembaharuan, penting sekali pengenalan budaya dengan baik serta pengertian terhadap pola-pola hidup tertentu sebagai bagian dari perubahan.

Tantangan Globalisasi

Menghadapi globalisasi yang sedang melanda dunia, minimal satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang dapat dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional oleh pemerintah (pusat) dan atau pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Untuk itu perlu dibentuk suatu badan hukum pendidikan, sehingga semua penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan formal baik yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, harus berbentuk badan hukum pendidikan (pasal 53

ayat 1). Badan hukum pendidikan yang dimaksud akan berfungsi memberikan pelayanan kepada peserta didik (pasal 53 ayat 2). Badan hukum pendidikan yang akan diatur dengan undang-undang tersendiri itu, harus berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.

Adanya badan hukum pendidikan itu, maka dana dari masyarakat dan dana bantuan asing, dapat diserap dan dikelola secara profesional, transparan dan akuntabilitas publiknya dapat dijamin. Dengan demikian badan hukum pendidikan akan memberikan landasan hukum yang kuat kepada penyelenggaraan pendidikan dan/atau satuan pendidikan nasional dalam menghadapi persaingan global.

Selain itu diperlukan pula lembaga akreditasi dan sertifikasi. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (pasal 60 ayat 1) yang dilakukan oleh pemerintah (pusat) dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas public (pasal 60 ayat 2). Akreditasi dilakukan atas kriteria yang bersifat terbuka (pasal 60 ayat 3), sehingga semua pihak, terutama penyelenggara dapat mengetahui posisi saun pendidikanya secara transparan.

Mengenai penyerapan tenaga kerja akan ditentukan oleh kompetensi yang dibuktikan oleh sertifikat kompetensi. Itulah sebabnya selain ijazah yang tidak akan diperlukan lagi untuk bekerja dalam era globalisasi, maka harus ada lagi sertifikat kompetensi (pasal 61 ayat 1). Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai

pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus, uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi (pasal 61 ayat 3).

Untuk mengantisipasi perkembangan global dan kemajuan teknologi komunikasi, maka pendidikan jarak jauh, diakomodasi dalam system pendidikan nasional sebagai paradig baru pendidikan (Arifin, A. 2003). Pendidikan jarak jauh itu dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan, dengan berfungsi untuk member layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau regular.

Globalisasi dalam Hubungannya dengan Pendidikan

Banyak sekolah di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini mulai melakukan globalisasi dalam sistem pendidikan internal sekolah yang biasa disebut manajemen berbasis sekolah. Hal ini terlihat pada sekolah-sekolah yang dikenal dengan *bilingual school*, dengan diterapkannya bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Mandarin sebagai mata ajar wajib sekolah. Selain itu berbagai jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang membuka program kelas internasional. Globalisasi pendidikan dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasar akan tenaga kerja berkualitas yang semakin ketat.

Globalisasi pendidikan diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat bersaing di pasar dunia. Apalagi dengan akan diterapkannya perdagangan bebas, misalnya dalam lingkup negara-negara ASEAN, mau tidak mau dunia pendidikan di Indonesia harus menghasilkan

lulusan yang siap kerja agar tidak menjadi “budak” di negeri sendiri. Pendidikan model ini juga membuat siswa memperoleh keterampilan teknis yang komplit dan detil, mulai dari bahasa asing, computer, internet sampai tata pergaulan dengan orang asing dan lain-lain. Sisi positif lain dari liberalisasi pendidikan yaitu adanya kompetisi. Sekolah-sekolah saling berkompetisi meningkatkan kualitas pendidikannya untuk mencari peserta didik.

Globalisasi seperti gelombang yang akan menerjang, tidak ada kompromi, kalau kita tidak siap maka kita akan diterjang, kalau kita tidak mampu maka kita akan menjadi orang tak berguna dan kita hanya akan jadi penonton saja. Akibatnya banyak desakan dari orang tua yang menuntut sekolah menyelenggarakan pendidikan bertaraf internasional dan desakan dari siswa untuk bisa ikut ujian sertifikasi internasional. Sehingga sekolah yang masih konvensional banyak ditinggalkan siswa dan pada akhirnya banyak pula yang gulung tikar alias tutup karena tidak mendapatkan siswa. Implikasinya, muncullah *home schooling*, yang melayani siswa memenuhi harapan siswa dan orang tua karena tuntutan global dan *virtual school* dan *virtual university*.

Muncul pula alternatif lain dalam memilih pendidikan:

1. Model *Cross Border Supply*, yaitu pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), pendidikan maya (*virtual education*) yang diadakan oleh Perguruan Tinggi Asing; contohnya United Kingdom Open University dan Michigan Virtual University.
2. Model *Consumption Aboard*, lembaga pendidikan suatu negara menjual jasa pendidikan dengan menghadirkan konsumen dari negara lain; contoh: hadirnya banyak para pemuda Indonesia

menuntut ilmu membeli jasa pendidikan ke lembaga-lembaga pendidikan ternama yang ada di luar negeri.

3. Model *Movement of Natural Persons*. Dalam hal ini lembaga pendidikan di suatu negara menjual jasa pendidikan ke konsumen di negara lain dengan cara mengirimkan personelnya ke negara konsumen. Contohnya dengan mendatangkan dosen tamu dari luar negeri bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia (tidak gratis tentunya).
4. Model *Commercial Presence*, yaitu penjualan jasa pendidikan oleh lembaga di suatu negara bagi konsumen yang berada di negara lain dengan mewajibkan kehadiran secara fisik lembaga penjual jasa dari negara tersebut.

Persaingan untuk menciptakan negara yang kuat terutama di bidang ekonomi, sehingga dapat masuk dalam jajaran raksasa ekonomi dunia tentu saja sangat membutuhkan kombinasi antara kemampuan otak yang mumpuni disertai dengan keterampilan daya cipta yang tinggi. Salah satu kuncinya adalah globalisasi pendidikan yang dipadukan dengan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia dikaitkan dengan pendidikan memberi konsep pendidikan antara lain lembaga pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat, keduanya saling menunjang, dan lembaga pendidikan seharusnya menjadi agen pembangunan di masyarakat (Pidarta, M. 1997). Selain itu hendaknya peningkatan kualitas pendidikan hendaknya selaras dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Tidak dapat kita pungkiri bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, untuk

dapat menikmati pendidikan dengan kualitas yang baik tadi tentu saja memerlukan biaya yang cukup besar.

Tentu saja hal ini menjadi salah satu penyebab globalisasi pendidikan belum dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Sebagai contoh untuk dapat menikmati program kelas Internasional di perguruan tinggi terkemuka di tanah air diperlukan dana lebih dari 50 juta. Alhasil hal tersebut hanya dapat dinikmati golongan kelas atas yang mapan. Dengan kata lain yang maju semakin maju, dan golongan yang terpinggirkan akan semakin terpinggirkan dan tenggelam dalam arus globalisasi yang semakin kencang yang dapat menyeret mereka dalam jurang kemiskinan.

Masyarakat kelas atas menyekolahkan anaknya di sekolah- sekolah mewah di saat masyarakat golongan ekonomi lemah harus bersusah payah bahkan untuk sekedar menyekolahkan anak mereka di sekolah biasa. Ketimpangan ini dapat memicu kecemburuan yang berpotensi menjadi konflik sosial. Peningkatan kualitas pendidikan yang sudah tercapai akan sia-sia jika gejolak sosial dalam masyarakat akibat ketimpangan karena kemiskinan dan ketidakadilan tidak diredam.

Selain itu ketidaksiapan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan bertaraf internasional dan ketidaksiapan guru yang berkompeten dalam menyelenggarakan pendidikan tersebut merupakan perpaduan yang klop untuk menghasilkan lulusan yang tidak siap pula berkompetisi di era globalisasi ini alias lulusan yang kurang berkualitas. Seperti yang dilansir KOMPAS.com tanggal 28 Oktober 2009 menyebutkan bahwa tiga hasil studi internasional menyatakan, kemampuan siswa Indonesia untuk semua bidang yang diukur secara

signifikan ternyata berada di bawah rata-rata skor internasional yang sebesar 500. Selain itu, data menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan SD adalah 95.23%, SMP 74.52% dan SM 55.73%. Pada tahun 2010, terdapat hampir 1 juta anak Indonesia yang mengalami putus sekolah. Angka putus sekolah Indonesia adalah SD sebesar 1.65%, SMP sebesar 2.33% dan SM sebesar 4.27%. Indikator dari rendahnya partisipasi pendidikan anak Indonesia dapat dilihat dari semakin rendahnya APM pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan semakin tingginya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa program pendidikan dasar 9 tahun relatif belum berhasil.

Selain itu, banyak penduduk tidak mampu melakukan partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, yang biasanya terhambat karena masalah kesulitan ekonomi. (<http://www.slideshare.net/Putera-SampoernaFoundaoon/kondisisiswaindonesia>, diakses September 2014).

Jika dibandingkan dengan siswa internasional, siswa Indonesia hanya mampu menjawab soal dalam kategori rendah dan sedikit sekali, bahkan hampir tidak ada yang dapat menjawab soal yang menuntut pemikiran tingkat tinggi. Hasil tiga studi tersebut mengemuka dalam seminar Mutu Pendidikan dan Menengah Hasil Penelitian Puspendik 2009 di Gedung Depdiknas, Jakarta, Rabu (28/10). Masih dalam Kompas.com tanggal 28 Oktober 2009 menyebutkan salah satu penelitian yang mengungkap lemahnya kemampuan siswa, dalam hal ini siswa kelas IV SD/MI, adalah penelitian Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), yaitu studi internasional dalam bidang

membaca pada anak-anak di seluruh dunia yg disponsori oleh The International Association for the Evaluation Achievement.

Hasil studi menunjukkan bahwa rata-rata anak Indonesia berada pada urutan keempat dari bawah dari 45 negara di dunia. Demikian hasil studi tersebut dipaparkan dalam laporan penelitian “Studi Penilaian Kemampuan Guru Melalui Video dengan Memanfaatkan Data PIRLS” oleh Suhardjono dari Pusat Penelitian Pendidikan Depdiknas di Jakarta, Rabu (28/10). Dalam laporan tersebut, Suhardjono menuturkan, muara dari lemahnya pembelajaran membaca patut diduga karena kemampuan guru dan kondisi sekolah.

Berdasarkan lansiran lain di Kompas.com tanggal 19 Juni 2009 Ir Hafilia R. Ismanto MM., Direktur Bidang Akademik LBPP LIA, menyebutkan bahwa sampai saat ini masih banyak guru belum berhasil untuk dijadikan role model sebagai pengguna Bahasa Inggris yang baik, penyebab hal tersebut karena selama ini pihak sekolah dan guru belum melakukan pendekatan integrasi antara content atau mata pelajaran dan Bahasa Inggris. Tidak semua guru mata pelajaran bisa diberdayakan untuk memberikan materi berbahasa Inggris, kecuali para guru itu memang benar-benar siap.

Pendidikan di Indonesia sekarang membuat rakyat biasa sangat menderita. Pendidikan menjadi sesuatu yang tak terjangkau rakyat kecil. Tidak ada penggolongan orang miskin dan orang kaya. Lembaga pendidikan telah dijadikan ladang bisnis dan dikomersialkan.

Kebijakan yang mahal ini memang sangat merisaukan karena akan mengubur impian mobilitas kelas sosial bawah untuk memperbaiki status kelasnya. Melalui sistem ini, maka yang bisa diserap dalam lingkungan

pendidikan adalah mereka yang memiliki modal yang cukup. Sekolah kian menjadi lembaga elite dan bahkan menjadi kekuatan yang menghadang arus mobilitas vertikal kelas sosial bawah. Dalam beberapa aktivitasnya bahkan sekolah ikut terlibat melegitimasi tatanan yang timpang. Jika diusut penyebab ini semua, tentu jawabannya adalah kebijakan ekonomi neoliberal. Neoliberalisme berangkat dari keyakinan akan ketidakberdayaan pasar serta pelumpuhan kekuasaan negara. Sekolah tidak perlu menjadi tanggungan negara, cukup diberikan pada mekanisme pasar. Biarlah pasar yang akan menyeleksi mana sekolah yang patut dipertahankan dan mana yang harus gulung tikar. Di situ pendidikan berangsur-angsur menjadi tempat eksklusif yang memberi pelayanan hanya pada mereka yang kuat membayar.

Implikasinya, jutaan rakyat Indonesia belum memperoleh pendidikan yang layak. Bahkan tidak sedikit pula yang masih berkategori masyarakat buta huruf. Mereka belum bisa menikmati dunia pendidikan seperti anggota masyarakat yang mampu “membeli” dan menikmati pendidikan. Masyarakat demikian mencerminkan suatu kesenjangan yang serius karena di satu sisi ada sebagian yang bisa membeli politik komoditi pendidikan secara mahal. Sementara tidak sedikit anggota masyarakat yang tidak cukup punya kemampuan ekonomi untuk bisa membebaskan diri dari buta huruf akibat dunia pendidikan yang tidak berpihak secara manusiawi kepada dirinya. Biaya pendidikan yang melangit ini terjadi di dunia pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi.

Tidak hanya itu implikasi dari makin mahalnya biaya pendidikan. Kualitas mahasiswa yang masuk perguruan tinggi pun

nantinya patut dipertanyakan karena bukan tidak mungkin uang yang akan berbicara. Siapa yang lebih banyak dia yang akan menang. Bisa jadi mereka yang memiliki kemampuan intelektual pas-pasan bisa mengenyam pendidikan di jurusan dan universitas favorit karena dia bisa membayar biaya yang cukup tinggi. Sementara itu, mereka yang memiliki kemampuan lebih tidak bisa menyandang gelar mahasiswa lantaran tidak memiliki kemampuan finansial.

Realitas menunjukkan, krisis yang menimpa dunia pendidikan di Indonesia, khususnya kualitas pendidikan yang rendah, merupakan persoalan yang sangat kompleks. Prasarana, sarana, dan fasilitas kurang memadai, anggaran pendidikan nasional yang sangat minim, dan banyaknya guru yang mengajar tidak sesuai dengan keahlian atau memang belum layak disebut guru merupakan faktor yang ikut menyulitkan pengembangan kualitas pendidikan.

Sungguh ironis memang, anggaran selalu naik tetapi kualitas lulusan tetap rendah dan justru dirasakan semakin mahal. Mengapa hal seperti ini terjadi, padahal kurikulum dan buku, entah sudah berapa kali diubah. Entah sudah berapa macam metode mengajar yang ditatarkan kepada guru. Akankah keadaan ini dibiarkan terus berlanjut? Jika tak menghasilkan lulusan yang berkualitas dan dapat diandalkan, dapatkah pendidikan itu disebut sebuah investasi untuk masa depan?

Kaitan Globalisasi Pendidikan dengan Dunia Perpustakaan

Perpustakaan berkembang pesat dari waktu ke waktu menyesuaikan dengan perkembangan pola kehidupan masyarakat, kebutuhan, pengetahuan, dan teknologi informasi. Menurut ALA (The

American Library Association) bahwa perpustakaan sebagai pusat media, pusat belajar, pusat sumber pendidikan, pusat informasi, pusat dokumentasi dan pusat rujukan (Riyanto, 2012).

Keberadaan Perpustakaan tidak bisa dipisahkan dengan dunia pendidikan, Karena perpustakaan merupakan lembaga yang mampu menunjang proses pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pada gilirannya dalam rangka membangun kehidupan masa depan yang maju dan sejahtera.

Oleh karena itulah sesuai dengan perkembangan zaman terutama di era globalisasi ini perpustakaan harus terus berbenah diri dan meningkatkan kualitas layanan. Bahkan di perguruan tinggi perpustakaan sudah menjadi tolok ukur kualitas lulusan yang dihasilkan. Pentingnya perpustakaan perguruan tinggi telah menjadi salah satu indikator mutu pendidikan di perguruan tinggi. Makin baik perpustakaannya maka makin baik pula mutu luaran perguruan tinggi tersebut”.

Dampak positif globalisasi pendidikan terhadap perpustakaan dapat dilihat dari meningkatnya kualitas layanan yang ada di perpustakaan, misalnya dengan diadakannya layanan-layanan yang sifatnya mengglobal seperti internet, fasilitas wi-fi. Selain itu koleksi-koleksi perpustakaan juga mulai bervariasi dan disesuaikan dengan internasionalisasi lembaga pendidikan yang menaunginya, seperti jumlah dan kualitas koleksi buku berbahasa Inggris semakin diperbanyak dan dilanggannya jurnal-jurnal yang standar internasional. Penyelenggaraan yang standar internasional ini tentunya membutuhkan biaya yang tidak murah, karena sudah diketahui oleh umum bahwa

harga buku-buku berbahasa Inggris harganya lebih mahal dibanding buku berbahasa Indonesia, dan untuk melanggan satu jurnal internasional juga harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Karena biaya yang tinggi tersebutlah, yang mampu menyelenggarakan perpustakaan dengan layanan dan kualitas yang baik tentunya perpustakaan yang berada di lembaga pendidikan yang punya modal dan pimpinan yang perhatian terhadap perkembangan dan pentingnya perpustakaan. Karena banyak lembaga pendidikan yang punya modal besar perpustakaan mereka kurang maju karena pemimpinannya yang tidak terlalu perhatian terhadap perpustakaan. Hal yang lebih parah lagi tentunya dialami oleh perpustakaan yang berada di lembaga-lembaga pendidikan yang modalnya kecil. Jangankan untuk meningkatkan layanan dan koleksi yang bersifat internasional, untuk merawat koleksi yang ada pun kadang masih terseok-seok. Sehingga dengan adanya globalisasi ini perpustakaan tersebut semakin tertinggal.

Namun untuk perpustakaan yang sudah bisa mengadakan dan menyesuaikan layanan dan koleksinya dengan standar internasional pun bukan berarti tanpa masalah. Banyak terjadi perpustakaan sudah banyak mengeluarkan biaya untuk menambah jumlah koleksi dan melanggan jurnal internasional dengan harga mahal, namun tingkat pemakaian dari penggunaannya masih sangat rendah dibanding penggunaan koleksi atau jurnal-jurnal yang berbahasa Indonesia. Ini artinya pengguna perpustakaan masih banyak yang belum siap dengan standar internasional.

Untuk menjawab perkembangan di dunia pendidikan ini maka mulai dari sekarang perpustakaan dan pustakawan harus mau dan

mampu mengikuti perkembangan tersebut. Pustakawan diharapkan mampu mengubah dan mengembangkan dirinya seiring dengan tuntutan perubahan. Pengembangan yang dimaksud adalah: (1) memahami peranannya atas dasar pola kemitraan bukan melayani; (2) memberikan makna/kontribusi bagi lembaganya (dalam hal ini sekolah atau perguruan tinggi) tidak sekedar fokus pada disiplin ilmu perpustakaan; (3) integrasi; (4) mampu mentransfer kemampuannya melalui pelatihan dan pembinaan, sehingga penggunaanya dapat memanfaatkan layanan-layanan yang ada di perpustakaan secara optimal; (5) inovasi.

Menurut Prastowo, A. (2012) bahwa ada beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan oleh pustakawan untuk pengembangan perpustakaan sekolah di era global, di antaranya dengan promosi perpustakaan, aplikasi IT (Information of Tecknology) dalam dunia perpustakaan, perpustakaan digital, perpustakaan hybrid, dan pengembangan perpustakaan sekolah dengan paradigma kekinian.

Solusi

Pemerintah sebagai pengemban amanat rakyat, dapat bergerak cepat menemukan dan memperbaiki celah-celah yang dapat menyulut kesenjangan dalam dunia pendidikan. Salah satunya dengan cara menjadikan pendidikan di Indonesia semakin murah atau bahkan gratis tapi bukan pendidikan yang murahan tanpa kualitas. Hal ini memang sudah dimulai di beberapa daerah di Indonesia yang menyediakan sekolah unggulan berkualitas yang bebas biaya. Namun hal tersebut baru berupa kebijakan regional di daerah tertentu. Alangkah baiknya jika pemerintah pusat menerapkan kebijakan tersebut dalam skala

nasional. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut pemerintah perlu melakukan pembenahan terutama dalam bidang birokrasi. Korupsi mesti segera diberantas, karena korupsi merupakan salah satu yang menghancurkan bangsa ini.

Ide Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Moh. Nuh yang mengingatkan, bahwa dalam dunia pendidikan tak boleh ada sikap diskriminatif yang disebabkan adanya perbedaan kaya dengan miskin akibat faktor wilayah kota dan desa sehingga seseorang kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan (Kompas.com, 3 November 2009) Perlu diimplementasikan dan dilaksanakan dengan segera, agar hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak dapat segera terwujud. Lembaga pendidikan perlu mempertimbangkan kurikulum maupun metodologi yang tidak banyak mengeluarkan biaya. Begitu juga, standar baru kualitas pendidikan yang tidak saja menyentuh kemampuan dan kreativitas siswa melainkan juga ongkos sekolah. Kriteria yang mempersyaratkan kemampuan menampung siswa tidak mampu sekaligus kemampuan untuk mensejahterakan guru. Sekolah tidak lagi diukur dari kemampuannya mencetak siswa yang pintar melainkan bagaimana mengajarkan siswa untuk saling bertanggung jawab dan mempunyai solidaritas tinggi. Standar internasional tentang kemampuan intelektual tidak akan bisa diraih dengan kondisi struktural yang masih mengalami persoalan ketimpangan dan kesenjangan sosial. Selain itu, solusi-solusi lain yang dapat dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan mutu SDM terutama Guru dalam penguasaan Bahasa Inggris dan Bahasa Asing lainnya

2. Peningkatan Mutu Guru dalam penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Peningkatan Mutu Manajemen sekolah dan Manajemen pelayanan pendidikan
4. Peningkatan Mutu sarana dan Prasarana
5. Penanaman nilai-nilai keteladanan
6. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
7. Penelitian dan pengembangan pendidikan

Penutup

Globalisasi pendidikan di Indonesia ditandai dengan ambivalensi yang apabila kita mengikuti arus globalisasi tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia setingkat dengan kualitas pendidikan Internasional, tetapi pada kenyataannya Indonesia belum siap untuk mengikuti arus tersebut sehingga kualitas pendidikan di Indonesia masih tertinggal.

Adanya kompetisi/persaingan di dalam dunia pendidikan karena kemajuan teknologi dan informasi. Bahkan sering terjadi kompetisi yang liar yang disebabkan oleh adanya aturan tidak beres pada birokrasi pendidikan, intervensi kepentingan modal raksasa, dan sekolah kurang mendapat perhatian yang layak dari pemerintah. Bagi instansi pendidikan yang mampu bersaing akan memperoleh hasil yang baik dan diakui oleh dunia luar. Bagi instansi yang belum siap bersaing akan mengalami tekanan dan banyak yang berjalan ditempat saja.

Globalisasi pendidikan juga membawa dampak adanya kesenjangan sosial dalam dunia pendidikan. Hanya orang-orang yang

bermodal besar saja yang dapat menikmati kualitas pendidikan dengan standar internasional.

Merosotnya kualitas pendidikan tak bisa dipisahkan dari kebijakan negara pada sektor pendidikan. Menyamakan lembaga pendidikan dengan lembaga keuangan jelas merupakan keputusan yang keliru. Liberalisasi pendidikan pada hakekatnya telah memasung akses siswa yang tidak mampu untuk menikmati sekolah. Karena itu, perlu adanya perombakan pada kebijakan yang menyangkut masalah pendidikan dengan menelurkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kaum miskin. Komersialisasi pendidikan mutlak harus dihentikan karena hanya memunculkan sekelompok orang yang menggunakan pendidikan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan.□

Daftar Pustaka

- Appadurai, A. 1990. *Disjunctruture and Difference in the Global Cultural Economy*. London: Sage.
- Arifin, A. 2003. *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang*
- Sisdiknas*. Jakarta: Dep.Agama Dirjen.Kelembagaan Agama Islam.
- Depari, E & MacAndreas,C. 1998. *Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Featherstone, M. 1990. *Global Culture: Nationalism, Globalization, and Modernity*. London: Sage.
- Hannerz, U. 1990. *Cosmopolitans and Lokals in World Culture*. London: Sage.

<http://www.slideshare.net/PuteraSampoernaFoundation/kondisi-siswaindonesia>, Diakses Tanggal 6 September 2014.

Kompas.com tanggal 28 Oktober 2009.

Kompas.com tanggal 9 September 2009.

Kompas.com tanggal 3 November 2009.

Munir. 2008. *Kurikulum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Bandung: Alfabeta

Pidarta, M. 1997. *Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Jakarta: Rineka ipta.

Prastowo, A. 2012. *Manajemen Perpustakaan Sekolah Profesional*. Yogyakarta: DIVA Press.

Riyanto. 2012. *Manajemen Perpustakaan Sekolah Berbasis Komputer*. Bandung: Fokus Media.

Sa'ud, U.S. 2008. *Inovasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta

Smith, A. 1990. *Towards a global Culture?*. London: Sage.

Undang-Undang Dasar 1945

UU Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

